DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING ***Volume 15, Nomor 3, Tahun 2026, Halaman 1-14***
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting ***ISSN (Online): 2337-3806***

UPAYA MENDORONG KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH MELALUI INSENTIF: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND*

Adila Rahma Putri, Endang Kiswara [1]

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6281229712577

ABSTRACT

This study aims to analyze the interaction of all Fraud Diamond elements in affecting the Local Revenue Performance of Central Java Province for the 2022–2025 period. The elements examined include incentive policies as Rationalization, GRDP per capita growth rate as Capability, accounts receivable growth rate as Opportunity, and annual inflation rate as Pressure. The methodology used is a quantitative descriptive non-statistical approach based on financial secondary archival data. The validity of conclusions is evaluated through pattern matching analysis techniques triangulated with the Examination Result Reports (LHP) of BPK RI, Central Bureau of Statistics (BPS) reports, and local Regional Regulations (Perda).

The results show that the integrated dynamics of Fraud Diamond elements is a fundamental instrument for the fluctuations of Local Revenue Performance. The contribution pillar of Central Java's regional autonomy is consistently independent, locking a Perfect Score of 3 (ratio 63.01%–67.30%) due to the strong national-scale economic Capability of the region. Meanwhile, the growth pillar is vulnerable to obstruction if the administrative Opportunity for tax postponement expands due to high inflation Pressure. The turnaround of success was achieved through strict active collection management that successfully reduced the growth rate of receivables to minus -15.93% in 2025, as well as accurate budget target settings to cut the space for bureaucratic Rationalization, thereby securing Local Revenue Performance to remain stable in the moderately effective criteria (95.37%). This study confirms the importance of the quantitative descriptive non-statistical Fraud Diamond framework in managing local fiscal risk mitigation.

Keywords: Fraud Diamond, Local Revenue Performance, Motor Vehicle Tax, Pattern Matching, Document Triangulation

PENDAHULUAN

Pendekatan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah harus memiliki ketahanan fiskal yang kuat agar mampu menyelenggarakan pemerintahan tanpa bergantung terus-menerus pada dana transfer pusat. Dalam kerangka tersebut, Kinerja Pendapatan Daerah menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam komposisi penerimaan kas Jawa Tengah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan sebagai sumber pendapatan utama dan komponen kunci dalam pembiayaan APBD setiap tahun. Peran penting PKB ini didukung oleh pandangan Ronald C. Fisher (2009) yang menyatakan bahwa pajak berbasis aset local merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Peneliti secara purposif menetapkan PKB sebagai lokus utama riset karena posisinya sebagai kontributor kas terbesar bagi APBD yang kepatuhannya krusial dalam menentukan otonomi keuangan daerah.

[1] *adilarahma@students.undip.ac.id*

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, di mana volume objek kendaraan terus meningkat menembus angka 12 juta unit pada tahun 2024. Menurut Fisher (2009), jenis pajak kendaraan bermotor lebih stabil dan memberikan kepastian tinggi dibanding pajak yang fluktuatif. Namun, berdasarkan data resmi Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Di saat volume objek kendaraan terus meningkat, rasio efektivitas pemungutan PKB justru merosot tajam dari 98,39% pada tahun 2022 menjadi 84,16% pada tahun 2024. Penurunan capaian ini disebabkan oleh penetapan target anggaran tahunan yang dipatok terlalu agresif oleh pemerintah daerah, melonjak tinggi dari Rp5,52 triliun menjadi Rp6,50 triliun, sedangkan realisasi kas riil berjalan cenderung stagnan di angka Rp5,47 triliun. Kesenjangan angka yang lebar inilah yang melahirkan celah pembenaran (*Rationalization*) administratif di tingkat birokrasi pelaksana Samsat.

Di sisi lain, efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jawa Tengah tahun 2024 sempat melompat optimal ke angka 93,27% akibat stimulus insentif pembebasan biaya pokok BBNKB II, namun kembali melorot tajam ke level 37,60% pada pertengahan tahun anggaran berjalan 2025. Fenomena perubahan performa fiskal yang fluktuatif ini mengindikasikan bahwa penggunaan program stimulus penghapusan denda secara berulang justru memicu munculnya perilaku *moral hazard* di masyarakat. Wajib pajak cenderung sengaja menunda pembayaran kewajiban perpajakannya karena mengharapkan secara psikologis bahwa pemerintah daerah akan kembali mengeluarkan kebijakan insentif fiskal di periode mendatang.

Urgensi evaluasi sistem pemungutan ini menjadi semakin mendesak pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Mulai Januari 2025, skema pembagian hasil bertransformasi total melalui pengenaan sistem Opsen Pajak sebesar 66% secara real-time langsung ke kas pemerintah Kabupaten/Kota. Integrasi tarif baru berdasarkan amanat UU HKPD ini secara nyata terbukti menambah beban biaya riil serta menaikkan resistensi psikologis masyarakat. Aturan opsen menaikkan total biaya pembayaran PKB secara signifikan dari Rp3.276.000 menjadi Rp3.806.725, sehingga memicu fenomena *Compliance Shock* (Syok Kepatuhan) secara makro di mana wajib pajak memilih menahan transaksi mereka.

Siklus perubahan historis di lapangan dipicu secara kualitatif oleh berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 23 November 2023 sebagai poros pembatas kebijakan (*policy intervention*). Perubahan dalam efektivitas penerimaan antara Periode Sebelum dan Periode Sesudah sangat dipengaruhi oleh kurangnya kepatuhan dari wajib pajak. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif non-statistik, penelitian kearsipan laporan keuangan ini menguji keterkaitan fenomena tersebut melalui potret elemen *Rationalization* (kebijakan insentif), *Capability* (PDRB per kapita), *Opportunity* (saldo piutang daerah), dan *Pressure* (inflasi regional).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PERTANYAAN PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran dan pengembangan pertanyaan penelitian.

Teori *Fraud Diamond*

Wolfe dan Hermanson (2004) memaparkan pengembangan model risiko dengan menambahkan elemen *capability* ke dalam tiga elemen klasik sebelumnya. Dalam bidang administrasi publik dan keuangan daerah, *Fraud Diamond Theory* digunakan sebagai pisau analisis konseptual superior untuk mengurai motif risiko ketidakpatuhan atau *moral hazard*

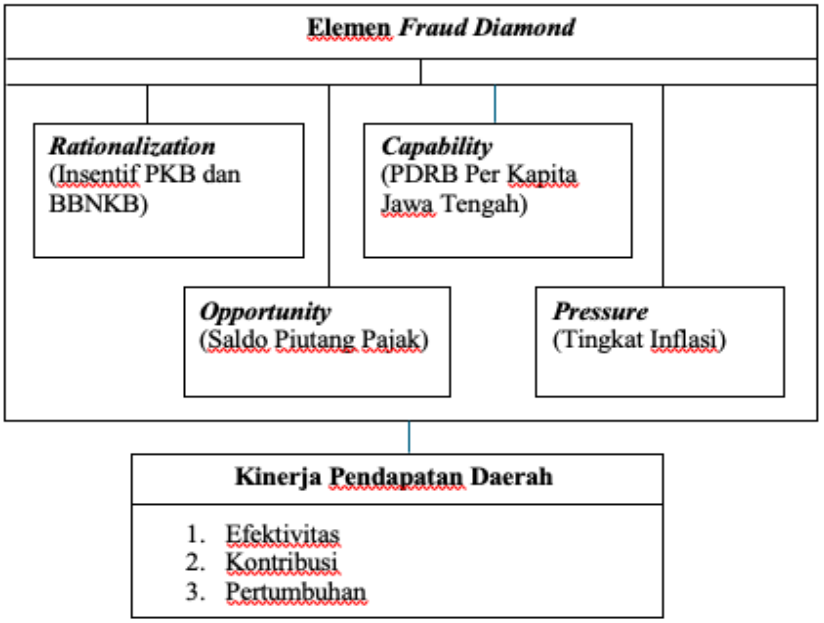
perpajakan secara multidimensional. Secara teoretis, model ini memetakan bahwa tindakan penundaan pajak kendaraan terjadi karena adanya interaksi dinamis antara komponen psikologis dan situasional individu. Model ini berasumsi bahwa ketidakpatuhan tidak berdiri sendiri melainkan dipicu oleh serangkaian motif dan celah sistem yang saling berkaitan di dalam tata kelola keuangan daerah. Dukungan terhadap model ini diperkuat oleh Chimonaki et al. (2023) yang menegaskan bahwa *Fraud Diamond Theory* sangat berguna karena menjelaskan mendalam karakteristik perilaku manusia yang memicu tindakan penyimpangan melalui komponen kapabilitas, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sejalan dengan itu, Peprah (2018) memperlihatkan adanya hubungan prediktif yang kuat antar-keempat elemen tersebut, di mana interaksi kapabilitas dengan kesempatan dan rasionalisasi memiliki kemampuan prediksi tertinggi dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini didukung oleh penelitian Sunardi dan Amin (2018) di Indonesia yang membuktikan secara empiris bahwa elemen kapabilitas berdampak positif signifikan sebagai penentu utama dieksekusinya suatu tindakan menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan fiskal yang efektif harus mampu mengurangi kapabilitas individu sekaligus memperkecil ruang rasionalisasi untuk mencegah ketidakpatuhan sejak dini.

Kecurangan perpajakan dalam kerangka ini dianalisis melalui elemen *rationalization* berupa proses mental pembenaran atas tindakan menunda kewajiban karena adanya ekspektasi psikologis terhadap stimulus kebijakan insentif fiskal berkala dari pemerintah daerah. Perilaku tersebut saling berkaitan erat dengan elemen *capability* yang mencerminkan kapasitas keuangan, daya beli, serta aspek hukum masyarakat yang diwakili oleh perkembangan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah. Potensi finansial tersebut kemudian bertransformasi menjadi ketidakpatuhan aktif saat wajib pajak mengeksplorasi elemen *opportunity* yang muncul akibat kelemahan pengawasan administrasi atau kelonggaran validasi kearsipan yang terekspos melalui akumulasi saldo piutang daerah. Seluruh dinamika tersebut akhirnya dipicu secara radikal oleh elemen *pressure* berupa dorongan finansial akibat tekanan anggaran institusional maupun jepitan kondisi ekonomi makro wajib pajak yang diukur melalui laju inflasi tahunan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan elemen *Fraud Diamond* dalam penelitian dalam skema.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Pertanyaan Penelitian

Dalam konteks elemen pertama, fenomena penetapan target anggaran yang tidak akurat sering kali menjadi pemicu utama untuk membenarkan atau merasionalisasi kegagalan dalam mencapai kinerja pemungutan pajak di lapangan. Melalui data perbandingan antara target dan realisasi kebijakan insentif fiskal, peneliti ingin menganalisis secara kualitatif bagaimana selisih angka tersebut memengaruhi pola pikir pelaksana birokrasi di tingkat operasional.

Pertanyaan Penelitian 1: **Bagaimana perbedaan antara target dan realisasi anggaran PKB serta BBNKB membentuk pola *Rationalization* yang berdampak pada efektivitas Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?**

Elemen kapabilitas sangat terkait dengan kapasitas ekonomi makro yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai pondasi utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal wilayah. Dengan melihat kondisi makro daerah, diharapkan terdapat keterkaitan logis antara output ekonomi masyarakat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi kas daerah yang ada.

Pertanyaan Penelitian 2: Bagaimana tingkat PDRB per kapita sebagai indikator dari kapabilitas ekonomi daerah dapat berkontribusi pada pencapaian indeks pertumbuhan dan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah?

Pada bagian pengelolaan administrasi keuangan daerah, tumpukan piutang pajak yang tidak tertangani secara aktif dan berkelanjutan dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah. Kerentanan dalam penagihan yang kurang aktif ini secara konseptual dianggap sebagai tantangan kelonggaran sistem yang menjadi celah kesempatan penghambat optimalisasi fiskal.

Pertanyaan Penelitian 3: Bagaimana akumulasi saldo piutang pajak daerah bisa menjadi penghambat dalam meningkatkan Kinerja Pendapatan Daerah?

Kondisi makroekonomi dari sisi wajib pajak juga memiliki peranan penting karena fluktuasi inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli serta mengurangi kepatuhan sukarela mereka dalam melunasi kewajiban. Tekanan dari faktor eksternal makroekonomi ini secara langsung bertindak sebagai batas pembatas luar bagi optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Pertanyaan Penelitian 4: Bagaimana dampak tekanan ekonomi yang berupa tingkat laju inflasi berpengaruh terhadap penurunan efektivitas pemungutan dan hasil Kinerja Pendapatan Daerah?

Setelah menganalisis setiap elemen secara parsial dan individual, penelitian deskriptif non-statistik ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif untuk melihat keseluruhan pengelolaan pendapatan dengan cara yang utuh. Peneliti harus mencocokkan kombinasi keseluruhan indikator keuangan dan makro tersebut dengan pengelompokan tingkat kinerja daerah secara terintegrasi.

Pertanyaan Penelitian 5: Bagaimana sintesis pola dari keseluruhan elemen *Fraud Diamond* (*Rationalization, Capability, Opportunity,* dan *Pressure*) dapat bersama-sama menjelaskan variasi dalam Indeks Kinerja Pendapatan Daerah di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, elemen Fraud Diamond yang digunakan beserta pengukurannya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kuantitatif deskriptif non-statistik ini meliputi seluruh catatan target, realisasi fiskal, saldo piutang, serta ekonomi makro (PDRB per kapita dan inflasi) di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan data penerimaan daerah ini merujuk pada pemikiran Prasetyo et al. (2022) dan Mushofa et al. (2024) mengenai validitas data empiris dalam mengukur keberlanjutan otonomi daerah. Selanjutnya, penentuan sampel menggunakan metode *Non-Probability Sampling* melalui pendekatan *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria inklusi dokumen yang ketat. Kriteria dokumen disyaratkan berupa berkas formal kenegaraan yang sah hasil audit LHP BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dan BPS terkait dengan tahun anggaran 2022 hingga data berjalan (*cut-off*) per Juli 2025. Melalui kriteria tersebut, diperoleh sampel definitif berupa satu kesatuan data agregat Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2025 yang valid untuk dianalisis melalui teknik pencocokan pola (*pattern matching*).

Elemen *Fraud Diamond* dan Pengukurannya

Tabel 1
Elemen *Fraud Diamond* dan Pengukurannya

No	Elemen	Indikator	Skala Data
1	*Rationalization*	Analisis Komparatif Performa Anggaran PKB dan BBNKB (Periode 2022-2023 vs 2024-2025)	Rasio
2	*Capability*	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Rasio
3	*Opportunity*	Laju Pertumbuhan Saldo Piutang Pajak Daerah	Rasio
4	*Pressure*	Tingkat Laju Inflasi Tahunan Daerah	Rasio
5	Kinerja Pendapatan Daerah	Indeks Kinerja Komposit (Gabungan Rasio Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan PAD)	Ordinal

Metode Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif deskriptif non-statistik ini dilaksanakan secara non-interaktif melalui metode dokumentasi kearsipan data sekunder laporan keuangan. Pemanfaatan data populasi yang akurat ini mengacu pada pandangan Mushofa et al. (2024) sebagai jembatan empiris antara teori dan praktik. Peneliti mengunduh secara elektronik data nominal target dan realisasi operasional dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, data PDRB per kapita dan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, serta berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Tengah periode 2022–2025. Riset ini juga mengintegrasikan metode studi pustaka berdasarkan pemikiran Fisher (2009) dan Prasetyo et al. (2022) untuk mengevaluasi regulasi Perda terkait serta jurnal ilmiah terdahulu karya P. C. Kurniawan (2019) dan Mauliyah et al. (2023) sebagai bahan triangulasi data kearsipan.

Metode analisis data menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif non-statistik dengan mengombinasikan kalkulasi tren dan telaah kearsipan kualitatif. Analisis deskriptif ini mengacu pada pemikiran Thompson (2009) yang menyatakan bahwa perencanaan deskriptif berfungsi krusial untuk menyusun ringkasan karakteristik data yang informatif agar profil amatan mudah

dipahami sebelum melangkah ke pengujian konseptual yang lebih kompleks. Peneliti menghitung rasio tren parsial empat elemen *Fraud Diamond*, yaitu capaian target insentif (*Rationalization*), pertumbuhan PDRB (*Capability*), pertumbuhan piutang (*Opportunity*), dan laju inflasi (*Pressure*). Selanjutnya, dilakukan standarisasi Kinerja Pendapatan Daerah melalui Indeks Scoring Komposit berdasarkan formula baku (Rasio Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan PAD) menjadi Bobot Skor Ordinal 1 (Rendah), 2 (Sedang), dan 3 (Tinggi). Tahap akhir riset ini menerapkan teknik Pencocokan Pola (*Pattern Matching*) dan Triangulasi Dokumen sebagai pengganti uji hipotesis statistik konvensional. Analisis dilakukan dengan menyandingkan kesesuaian logis tren skor kinerja daerah dengan fluktuasi elemen *Fraud Diamond*, lalu memvalidasinya terhadap catatan tekstual berkas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LHP BPK RI menggunakan model koherensi Risjord et al. (2002) guna menjamin keabsahan konklusi akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Elemen *Rationalization* (Indikator Insentif PKB dan BBNKB)

Elemen *Rationalization* ditelaah melalui analisis komparatif performa realisasi kas terhadap target anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Jawa Tengah periode sebelum (2022–2023) dibandingkan sesudah (2024–2025) regulasi baru. Kesenjangan target-realisasi yang lebar mencerminkan ketidakakuratan perencanaan yang berpotensi memicu munculnya pembenaran administratif dari pelaksana birokrasi bahwa kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal makro, bukan kelemahan sistem pemungutan. Dinamika integratif dari kedua sektor utama perpajakan daerah ini disajikan secara ringkas dalam visualisasi tren.

Gambar 2
Grafik Target dan Realisasi PKB dan BBNKB Provinsi Jawa Tengah (2022-2025)



Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Berdasarkan Gambar 2, periode 2022 - 2023 menunjukkan stabilitas dengan realisasi PKB mencapai Rp5,43 Triliun (target Rp5,52 Triliun) pada 2022 dan Rp5,51 Triliun (target Rp6,02 Triliun) pada 2023. Kinerja positif juga dicatat BBNKB dengan realisasi Rp2,89 Triliun (2022) dan Rp2,96 Triliun (2023). Sebaliknya, periode 2024 - 2025 mengalami fluktuasi tajam. Pada tahun 2024, target PKB dinaikkan agresif menjadi Rp6,51 Triliun namun realisasi stagnan di angka Rp5,47 Triliun (efektivitas 84,16%), sehingga memicu ruang pembenaran pelaksana akibat syok industri otomotif global. Titik balik dicapai sektor BBNKB 2024 yang melonjak hingga 93,27% (realisasi Rp3,07 Triliun dari target Rp3,29 Triliun) berkat insentif pembebasan pokok BBNKB II dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023. Sementara data berjalan 2025 (*cut-off* Juli) mencatat realisasi PKB Rp2,37 Triliun (target Rp4,35 Triliun) dan BBNKB Rp0,96 Triliun (target Rp2,55 Triliun) yang mencerminkan langkah kehati-hatian fiskal serta adanya indikasi moral hazard wajib pajak menunda pembayaran untuk menunggu insentif berikutnya.

Elemen *Capability* (Indikator PDRB per Kapita Provinsi Jawa Tengah)

Elemen *Capability* dievaluasi untuk menilai kapasitas ekonomi makro wilayah dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan fiskal daerah. Fluktuasi riil penerimaan kas daerah disandingkan dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Jumlah Penduduk, serta pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2022 hingga 2025 rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2
Data PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah

Indikator	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB ADHK (Milliar Rp)	1.050.278,09	1.102.437,49	1.156.998,88	1.219.148,60
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	37.180.410	37.540.960	37.892.380	38.233.930
PDRB Per Kapita ADHK (Rp)	41.934.460	45.162.080	47.970.480	50.823.640
Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	**-**	**4,97%**	**4,95%**	**5,37%**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (diolah), 2026

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Jawa Tengah tumbuh pesat dari Rp1.559.140,36 miliar (2022) menjadi Rp1.943.187,66 miIiar (2025), mengukuhkan posisinya sebagai kontributor PDRB terbesar ke-4 nasional. Sesuai pemikiran Fisher (2009) dan Prasetyo et al. (2022), pertumbuhan ekonomi regional merupakan elemen kunci kemandirian finansial daerah, di mana output ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan efektivitas penerimaan pajak. Pada periode awal (2022–2023), pertumbuhan ekonomi bergerak stabil di angka 4,97%. Namun, realisasi kas daerah berjalan lambat karena beban tarif pokok balik nama dirasakan terlalu tinggi. Dalam perspektif *Fraud Diamond*, elemen *Capability* mencerminkan kapasitas wajib pajak untuk mengeksplorasi celah ketidakpatuhan dengan menunda pembayaran dan mengalokasikan dananya pada sektor konsumsi lain saat biaya administrasi dianggap membebani keuangan mereka.

Fenomena berbalik arah (*turnaround*) terjadi pada periode penguatan kebijakan (2024-2025), di mana ekonomi tumbuh pesat hingga mencapai 5,37% dengan dukungan demografis mencapai 38.233,93 ribu jiwa. Peningkatan kapasitas makro ini memperkuat daya beli riil masyarakat secara agregat yang dalam lensa *Fraud Diamond* meningkatkan kapasitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui stimulus pembebasan biaya pokok balik nama kedua (BBNKB II) dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah berhasil menekan biaya kepatuhan, mengurangi resistensi psikologis, dan sukses mengonversi objek pajak pasif menjadi wajib pajak aktif yang menopang stabilitas Kinerja Pendapatan Daerah.

Elemen *Opportunity* (Indikator Saldo Piutang Pajak)

Elemen *Opportunity* dipetakan melalui tren pertumbuhan saldo piutang bruto Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Tengah. Akumulasi piutang yang tertahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LHP BPK RI mencerminkan adanya kelonggaran pengawasan administrasi atau penagihan aktif, yang secara tidak langsung membuka celah kesempatan bagi wajib pajak untuk menunda kewajibannya.

Tabel 3
Saldo Piutang Bruto PKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase *Growth Rate* (%)	Kriteria Kinerja
2022	2.212.218.992.400	-	-
2023	2.625.551.335.300	+18,68%	Rendah (Tidak Berhasil)
2024	2.897.325.081.950	+10,35%	Rendah (Tidak Berhasil)
2025	2.435.663.820.047	-15,93%	Sangat Rendah (Berhasil)

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Saldo piutang bruto PKB tahun 2022 mencapai Rp2,21 Triliun, yang didominasi tunggakan dampak pandemi tahun 2020-2021, sehingga Tim Penghapusan Piutang melakukan koreksi data dan menghapus piutang kedaluwarsa Rp332,01 Miliar. Pada tahun 2023, pertumbuhan saldo piutang melompat 18,68% (penambahan utang Rp413,33 Miliar) dan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar 10,35% hingga menyentuh rekor tertinggi Rp2,89 Triliun. Dalam perspektif *Fraud Diamond*, ketika kelonggaran pengawasan masa lalu terakumulasi tanpa penagihan aktif yang masif, wajib pajak mendeteksi adanya elemen *Opportunity*. Kondisi di mana potensi pendapatan masih terjebak dalam bentuk komitmen hukum ini bertindak sebagai faktor penghambat (*inhibitor*) laju pertumbuhan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) total.

Fenomena berbalik arah (*turnaround*) yang sangat positif berhasil dibukukan pada tahun anggaran 2025, di mana nilai saldo piutang dipangkas jatuh ke angka Rp2,43 Triliun, atau mencetak sejarah pertumbuhan minus sebesar -15,93% (Kriteria Risiko Celah Sangat Rendah). Penurunan piutang yang masif sebesar Rp456,09 Miliar ini secara empiris membuktikan keberhasilan pengosongan saldo tertunggak di masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui penegakan hukum penagihan aktif dari rumah ke rumah (*door-to-door*). Pemprov secara taktis mempersempit elemen *Opportunity* dengan menutup celah penundaan wajib pajak melalui perluasan birokrasi digital desa lewat perluasan jaringan layanan SAMSAT Budiman di 705 lokasi bersama BUMDes serta optimalisasi aplikasi Sakpole guna mengonversi tunggakan menjadi aliran kas bersih riil.

Elemen Pressure (Indikator Inflasi Tahunan)

Elemen *Pressure* ditinjau berdasarkan tekanan ekonomi makro eksternal di luar kendali daerah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai wajib pajak melalui laju inflasi tahunan. Laju inflasi tahunan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2022–2025.

Tabel 4
Data Laju Inflasi Tahunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kalender	Laju Inflasi Harga Konsumen Tahunan (%)	Kriteria Laju Inflasi	Tingkat Tekanan (Pressure) Wajib Pajak
2022	5,63	Inflasi Sedang	Tinggi
2023	2,89	Inflasi Ringan (Stabil)	Rendah
2024	1,67	Inflasi Sangat Rendah	Sangat Rendah
2025	2,72	Inflasi Ringan (Stabil)	Rendah

Provinsi Jawa Tengah mencatat angka inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,63% pada tahun 2022, yang masuk kategori Inflasi Sedang dan mencerminkan tingkat *Pressure* yang Tinggi bagi masyarakat akibat lonjakan harga komoditas global dan penyesuaian harga BBM. Tekanan finansial yang berat ini memaksa masyarakat memprioritaskan sisa kas domestik untuk konsumsi pokok pangan primer dan energi, sehingga menurunkan kepatuhan sukarela di lapangan. Melalui kacamata *Fraud Diamond*, tingginya indikator *Pressure* ini bertindak sebagai faktor pembatas luar (*external inhibitor*) yang menggerus daya beli riil rumah tangga, memaksa masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan, dan melandasi penurunan rasio efektivitas pemungutan total daerah di tahun anggaran yang sama.

Fase relaksasi tekanan ekonomi terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025, di mana laju inflasi berhasil ditekan secara masif hingga menyentuh angka 2,89% pada tahun 2023, mencapai titik terendah 1,67% pada tahun 2024, dan bergerak stabil di level 2,72% pada tahun 2025. Karakteristik inflasi yang terkendali di bawah batas psikologis 3% (Kriteria Inflasi Ringan/Stabil) ini mencerminkan kondisi makro ekonomi makro Jawa Tengah yang sangat kondusif. Merujuk proyeksi makro Fisher (2009), stabilnya harga pasar memperluas batas toleransi finansial rumah tangga dan mengurangi beban tekanan ekonomi. Kondisi ini memberikan ruang kas yang lebih longgar bagi wajib pajak untuk merespons program stimulus insentif fiskal secara positif, sehingga secara logis berkontribusi searah terhadap pemulihan dan penguatan Kinerja Pendapatan Daerah seutuhnya.

Indeks Scoring Kinerja Pendapatan Daerah

Penilaian terhadap Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai indikator hasil (*outcome*) tingkat otonomi, efektivitas, dan kemandirian fiskal daerah setelah merespons dinamika seluruh elemen *Fraud Diamond*. Mengacu pada temuan Prasetyo et al. (2022), aspek ini sangat strategis dalam menjaga ketahanan ruang fiskal dari ketergantungan transfer pusat. Evaluasi dilakukan dengan menghitung tiga komponen rasio keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) resmi hasil audit LHP BPK RI Perwakilan Jawa Tengah (Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan PAD) periode 2022–2025.

Tabel 1
Hasil Perhitungan Rasio dan Penentuan Skor Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen Kinerja Pendapatan Daerah	Tahun	Nilai Persentase Riil (%)	Predikat Kriteria Tahunan	Bobot Skor Ordinal
1. Rasio Efektivitas PAD	2022	100,76%	Tinggi	3
	2023	94,92%	Sedang	2
	2024	94,93%	Sedang	2
	2025	95,37%	Sedang	2
2. Rasio Kontribusi PAD	2022	67,30%	Tinggi	3
	2023	67,06%	Tinggi	3
	2024	66,91%	Tinggi	3
	2025	63,01%	Tinggi	3
3. Rasio Pertumbuhan PAD	2022	-	-	-
	2023	4,60%	Sedang	2
	2024	3,75%	Sedang	2
	2025	-15,17%	Rendah	1

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Nilai keuangan daerah dianalisis melalui penggabungan sektor utama (PKB dan BBNKB) yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan implementasi insentif fiskal daerah (Kurniawan, 2019) (Mauliyah et al., 2023). Sejalan dengan pandangan Harlow (2023) mengenai integrasi multidimensi, pemberian skor digunakan sebagai predikat performa tahunan

Provinsi Jawa Tengah untuk memetakan titik kerja optimal atau kontraksi. Hasil data membuktikan bahwa pilar otonomi Jawa Tengah sangat tangguh, ditunjukkan oleh rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang konsisten mendominasi di kisaran 63% hingga 67% (Skor Sempurna 3). Hal ini membuktikan kemandirian fiskal daerah yang kebal dari ketergantungan transfer pusat. Pilar efektivitas bergerak stabil di level aman dengan bobot Skor 2 (Cukup Efektif). Sementara pilar pertumbuhan melambat pada 2023–2024 dan mengalami kontraksi sebesar -15,17% (Skor 1) pada 2025. Penurunan ini dipicu oleh batasan data (*cut-off*) berjalan posisi Juli 2025 serta dampak penambahan beban biaya riil skema baru Opsen Pajak UU HKPD yang memicu *Compliance Shock* wajib pajak. Secara teoretis, tren skor anggaran ini selaras dengan teori Fisher (2009) dan pandangan Arman (2021) bahwa data resmi LHP BPK merupakan bukti paling valid untuk menilai efektivitas nyata kebijakan fiskal. Dinamika fluktuasi skor predikat tahunan inilah yang menjadi basis analisis teknik pencocokan pola (*pattern matching*) terintegrasi.

Analisis Pattern Matching dan Intepretasi Hasil

Analisis kuantitatif deskriptif non-statistik melalui teknik *pattern matching* membuktikan bahwa optimalisasi PAD diraih dengan menekan elemen risiko *Fraud Diamond*, bukan sekadar menaikkan target sepihak. Tabel 5 mencatat pilar kontribusi PAD konsisten mengunci Skor Sempurna 3 (63,01%–67,30% terhadap APBD). Ketangguhan otonomi ini dipicu oleh tingginya *Capability* ekonomi makro regional sebagai kontributor PDRB terbesar ke-4 nasional dengan nilai ADHB mencapai Rp1.943,18 Triliun dan laju pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 5,37% pada tahun 2025, sejalan dengan teori otonomi daerah Fisher (2009).

Namun, otonomi daerah tersebut rentan bergeser apabila akurasi penganggaran di tingkat birokrasi pelaksana diabaikan. Pada Periode Baseline (2022–2023), rasio efektivitas PAD bergerak optimal (100,76% dan 94,92%) karena realisasi PKB stabil mendekati target. Sebaliknya pada tahun 2024, ketika target anggaran PKB ditekan terlalu agresif melonjak hingga Rp6,50 triliun sedangkan realisasi kas riil berjalan stagnan di angka Rp5,47 triliun, persentase capaian target sektoral menurun ke level 84,16%. Deviasi anggaran yang melebar ini memicu munculnya elemen *Rationalization* birokrasi Samsat akibat krisis komponen global rilis data AISI (anjlok 43%) dan GAIKINDO (*wholesale* mobil nasional ambruk 14,7%).

Potensi ekonomi makro regional tersebut juga rentan mengalami hambatan apabila celah pengawasan administrasi dibiarkan terbuka. Berdasarkan dokumen CaLK LHP BPK RI, saldo piutang bruto PKB melonjak tinggi sebesar 18,68% pada tahun 2023 (menjadi Rp2,62 Triliun) seiring membengkaknya nilai penyisihan piutang tidak tertagih Rp485 Miliar, yang menahan pertumbuhan PAD melambat di angka 4,60%. Tumpukan tunggakan triliunan ini merepresentasikan elemen *Opportunity* akibat kelemahan validasi mutasi kepemilikan pasca-pandemi, sehingga Tim Penghapusan Piutang terpaksa menghapus utang kedaluwarsa Rp332,01 Miliar. Pembengkakan piutang memuncak pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi baru sebesar Rp2,89 Triliun (tumbuh 10,35%), yang berimbas pada melemahnya pertumbuhan PAD total provinsi ke angka 3,75% (Skor 2).

Di saat bersamaan, gejolak harga pasar bertindak sebagai elemen *Pressure* yang merusak daya beli masyarakat. Pada tahun amatan 2022, data BPS mencatat laju inflasi Jawa Tengah melonjak tinggi mencapai 5,63% akibat kenaikan harga BBM global. Tekanan eksternal (*external constraint*) ini memaksa masyarakat mendahulukan konsumsi pangan primer dan menunda pajak kendaraan, sehingga realisasi pajak daerah total mencatat rapor merah karena hanya mencapai target optimal 98,04%. Sebaliknya, fase relaksasi tekanan ekonomi (*Low Pressure*) berhasil dikendalikan sepanjang tahun 2023 hingga 2024 di level aman (2,89% dan 1,67%), yang memperluas batas toleransi finansial rumah tangga wajib pajak.

Guna mempertahankan stabilitas kas daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah intervensi anggaran taktis untuk memotong seluruh mata rantai risiko *Fraud Diamond* secara simultan. Pemprov mereduksi ruang pembenaran dengan mematok target tahun 2025 yang lebih realistis sebesar Rp15,69 triliun, serta memberikan stimulus

pembebasan biaya pokok BBNKB II yang sukses memicu pembalikan arah efektivitas BBNKB melonjak hingga 93,27% kebijakan progresif ini sekaligus dirancang untuk menyongsong skema baru Opsen Pajak Daerah per UU HKPD berupa real-time split 66% ke Kabupaten/Kota. Secara simulasi, aturan opsen menaikkan biaya riil pendaftaran kendaraan dari Rp3,27 juta menjadi Rp3,80 juta, yang memicu fenomena *Compliance Shock* sehingga pilar pertumbuhan PAD terkontraksi di angka -15,17% pada tahun transisi 2025.

Pemerintah daerah memitigasi risiko tersebut dengan memperketat pengawasan dan menutup celah penundaan melalui perluasan birokrasi digital desa lewat jaringan layanan SAMSAT Budiman di 705 lokasi bersama BUMDes, penagihan aktif *door-to-door*, serta gerakan "Gadis Pantura" dan "Podcast Chips". Ekspansi ini terbukti sukses memangkas saldo piutang bruto tahun 2025 hingga mencetak pertumbuhan minus sebesar -15,93% (Risiko Celah Sangat Rendah), sehingga mengamankan pilar rasio efektivitas PAD 2025 tetap pulih di angka 95,37% (Bobot Skor 2). Secara metodologis, hasil interpretasi akhir ini memberikan justifikasi ilmiah terhadap gagasan kontemporer Aydın (2026) bahwa dorongan fiskal yang diimbangi efisiensi birokrasi digital lokal mampu mereduksi beban kepatuhan (*compliance costs*) masyarakat, menetralkan tekanan makro, serta mempertahankan opini audit tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi Kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif deskriptif non-statistik, penentuan indeks scoring, serta teknik pencocokan pola (*pattern matching*) yang diperkuat melalui triangulasi dokumen kearsipan, ditarik konklusi bahwa interaksi elemen *Fraud Diamond Theory* merupakan instrumen krusial dalam menentukan stabilitas Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ketidakakuratan penetapan pagu anggaran tahun 2024 (target PKB Rp6,50 triliun dengan realisasi stagnan Rp5,47 triliun) memicu deviasi lebar yang melahirkan celah (*Rationalization*) administratif pelaksana birokrasi, namun langsung pulih di angka 95,37% (Bobot Skor 2) pada tahun 2025 setelah pagu disesuaikan secara realistis. Di sisi lain, kapasitas ekonomi makro Jawa Tengah yang sangat kuat (tumbuh di kisaran 4,97%–5,37% sebagai PDRB terbesar ke-4 nasional) bertindak sebagai jangkar utama (*Capability*) yang mengunci rasio kontribusi PAD pada Skor Sempurna 3 (kontribusi 63,01%–67,30%), sementara stimulus pembebasan biaya pokok BBNKB II sukses mendongkrak efektivitas kas ke angka tertinggi 93,27%.

Pencocokan pola juga mengungkap bahwa potensi otonomi daerah tersebut rentan terhambat oleh celah (*Opportunity*) penundaan pajak akibat membubungnya saldo piutang bruto PKB hingga mencapai rekor tertinggi Rp2,89 triliun pada tahun 2024, yang menahan laju pertumbuhan kas daerah melambat di kisaran 3%–4%. Ruang kesempatan ini berhasil ditutup pada tahun 2025 hingga mencetak pertumbuhan piutang minus sebesar -15,93% melalui masifikasi penagihan aktif *door-to-door* dan perluasan layanan SAMSAT Budiman di 705 desa. Kondisi penundaan tersebut secara historis dipicu oleh elemen *Pressure* berupa lonjakan inflasi daerah sebesar 5,63% pada tahun 2022 yang menggerus daya beli masyarakat, yang kemudian berhasil direduksi lewat kestabilan inflasi rendah (1,67%–2,72%) pada periode 2023–2025. Secara simultan, implementasi mekanisme baru Opsen Pajak Daerah per UU HKPD terbukti meningkatkan simulasi beban biaya riil pendaftaran kendaraan dari Rp3,27 juta menjadi Rp3,80 juta, sehingga memicu fenomena *Compliance Shock* (Syok Kepatuhan) yang menjadi penjelasan tandingan atas kontraksi pertumbuhan PAD sebesar -15,17% pada tahun transisi 2025.

Keterbatasan

Penelitian kuantitatif deskriptif non-statistik ini memiliki keterbatasan karena data tahun anggaran 2025 masih bersifat data berjalan (*cut-off*) per Juli 2025 sehingga memicu kontraksi teknis pertumbuhan yang belum mencerminkan hasil akhir satu tahun kalender penuh. Selain itu, ruang lingkup dokumen triangulasi kearsipan murni bertumpu pada lembar LHP BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dan regulasi Perda tanpa mencakup dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Fokus lokus amatan dalam riset ini juga masih terbatas pada tingkat agregat makro Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dan belum memperluas cakupan pemetaan klaster komparatif di 35 wilayah kabupaten/kota di bawahnya secara individual.

Saran

Merespons batasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah direkomendasikan terus meningkatkan keakuratan validasi basis data kendaraan aktif (*cleansing data*) secara *real-time* guna meminimalisasi ruang pembenaran (*Rationalization*) pelaksana Samsat di lapangan. Mengingat keberhasilan pemotongan piutang hingga tumbuh minus -15,93%, Bapenda disarankan memperluas ekspansi jaringan digital SAMSAT Budiman bersama BUMDes di wilayah pelosok guna menutup celah (*Opportunity*) penundaan pajak, serta mengintensifkan sosialisasi kreatif digital melalui program "Gadis Pantura" dan "Podcast Chips" guna mereduksi beban kepatuhan (*compliance costs*) serta memotong resistensi psikologis masyarakat wajib pajak menjelang berlakunya aturan penuh Opsen Pajak UU HKPD. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan dokumen LHP BPK versi satu tahun kalender penuh untuk akurasi data pertumbuhan PAD, serta memperluas lokus riset melalui metode studi komparatif antar-provinsi di Pulau Jawa demi memperkaya variasi pola interaksi *Fraud Diamond* dalam lanskap kemandirian fiskal daerah di Indonesia.

REFERENSI

Fisher, R. C. (2009). *Property Taxes for Local Finance: Research Results and Policy Perspectives (Reconsidering Property Taxes: Perhaps Not So Bad After All)* (WP09RF1).

Arman, A. (2021). Analysis of Motor Vehicle Tax Revenues before and after the Tax Kring. *Point of View Research Accounting and Auditing*, *2*(2), 144–149. https://doi.org/10.47090/povraa.v2i2.127

Aydın, M. (2026). Fiscal Policy and Supply Chain Resilience: The Role of Tax Incentives. *Amfiteatru Economic*, *28*(71), 307–326. https://doi.org/10.24818/EA/2026/71/307

Harlow, L. L. (2023). *The Essence of Multivariate Thinking* (3rd ed.). Routledge.

Kurniawan, D. (2001). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *E-Jurnal Unisfat*, *7*(2), 129–144.

Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *2*(1), 14–24. https://doi.org/10.18196/jati.020113

Mauliyah, N. I., Anggriyani, R., Munawaroh, L., & Khotimah, L. N. (2023). Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. *Jurbisman: Jurnal Bisnis Manajemen*, *1*(1), 95–108.

Mushofa, Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. In *Jurnal Syntax Admiration* (Vol. 5, Number 12).

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, *1*(1), 37–56. https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4799

Risjord, M. W., Dunbar, S. B., & Moloney, M. F. (2002). Clinical Scholarship A New Foundation for Methodological Triangulation. *Journal of Nursing Scholarship*, *34*(3), 269–275.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, *74*(12), 38–42. https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs

Thompson, C. B. (2009). Descriptive Data Analysis. *Air Medical Journal*, *28*(2), 56–59. https://doi.org/10.1016/j.amj.2008.12.001

Chimonaki, C., Papadakis, S., & Lemonakis, C. (2023). Perspectives in fraud theories – A systematic review approach. *F1000Research*, *12*(933), 1–22. https://doi.org/10.12688/f1000research.131896.1

PEPRAH, W. K. (2018). Predictive Relationships among the Elements of the Fraud Diamond Theory: The Perspective of Accountants. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, *8*(3), 141–148. https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4547

Sunardi, & Amin, M. N. (2018). Fraud detection of financial statement by using fraud diamond perspective. In *International Journal of Development and Sustainability* (Vol. 7, Number 3). www.isdsnet.com/ijds